

Ketergantungan Negara terhadap Pasar Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan melalui Studi Perbandingan

Ni Made Laksmi Udayani¹, Hermini Susiatiningsih², Andi Akhmad Basith Dir³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia, mdudayani@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia, akhmad.basith.dir@gmail.com

ABSTRAK

Ketahanan pangan menjadi sangat penting sejak krisis pangan yang terjadi pada tahun 2008. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 hingga 2014, krisis yang terjadi akibat pertambahan jumlah penduduk di Indonesia mendorong peningkatan permintaan pangan. Namun, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, hal ini masih bergantung pada ketersediaan dari pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa negara seperti Indonesia bergantung pada pasar internasional untuk aspek ketahanan pangan meskipun telah memiliki kemampuan untuk mencapai pemenuhan pangan. Untuk menganalisis alasannya, konsep keunggulan komparatif, ketergantungan, dan kemampuan nasional akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor mengapa negara bergantung pada pasar internasional untuk mencapai ketahanan pangannya. Disertai perbandingan antara Indonesia dengan Vietnam, Malaysia dan Amerika Serikat untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam mencapai ketahanan pangan di pasar internasional. Kajian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan fokus perbandingan pada penelitian eksplanatif dan menggunakan studi literatur dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan keunggulan komparatif negara lain yang dalam hal ini adalah Vietnam dan Malaysia, sistem pasar internasional yang mendorong ketergantungan, dan ketidakmampuan Indonesia dalam memaksimalkan kemampuan nasionalnya dibandingkan dengan Amerika Serikat

Keywords: dependensi, keunggulan komparatif, kapabilitas nasional, Indonesia, ketahanan pangan.

ABSTRACT

Food security becomes very important as a food crisis occurred in 2008. Under the administration of Susilo Bambang Yudhoyono from 2009 to 2014, the crisis due to the increase in population in Indonesia encourages an increase in food demand. However, to fulfill Indonesia's food demand it still depends on availability from the international market. This research aims to analyze why countries like Indonesia dependent on international markets for food security aspect despite having the capability to achieve the fulfillment of food. To analyze the reasons, the concepts of comparative advantage, dependency, and national capabilities will be used to analyze the factors on why nations depend on the international market to achieve its food security. Accompanied by a comparison between Indonesia with Vietnam, Malaysia and the United States to see the similarities and differences to achieve food security in the international market. With qualitative research methods and comparison focus on explanative research also using literature studies in data collection. The results of this study find that Indonesia dependence are influenced by the comparative advantage policy of other countries which in this cases are Vietnam and Malaysia, the international market system that encourages dependency, and Indonesia inability to maximizing its national capability compared to the United States.

Keywords: *dependency, comparative advantage, national capabilities, Indonesia, food security.*

Pendahuluan

Krisis pangan global terbesar di abad 21 memuncak di tahun 2008 karena adanya beberapa pendorong. Kekeringan, penurunan lahan garapan pangan, dan peningkatan permintaan atau kebutuhan pangan yang tidak sebanding dengan persediaan merupakan beberapa faktor pendorongnya. Peningkatan jumlah kebutuhan pangan dilatarbelakangi oleh prediksi peningkatan penduduk sebanyak kurang lebih 1,25 persen per tahun. Menurut konsep Malthus dalam Purwaningsih, pertumbuhan pangan seperti deret hitung dan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sehingga kebutuhan akan terus tumbuh lebih dari kemampuan dalam memenuhi kuota persediaan pangan.¹ Pada saat yang sama, Indonesia memasuki periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009 hingga 2014. Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia dari 2005 hingga 2009 meningkat sebanyak 1,26 persen. Kemudian, dari tahun 2009 hingga 2014 meningkat sebanyak 1,46 persen (2010), 1,44 persen (2011), 1,41 persen (2012), 1,37 persen (2013), dan 1,35 persen (2014).² Peningkatan ini sesuai dengan prediksi peningkatan penduduk dalam Purwaningsih yakni 1,25 persen per tahun. Sedangkan Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan terkena dampak kenaikan harga yang pesat di pasar internasional.³

Permasalahan ketahanan pangan juga mempengaruhi usaha negara dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Salah satu usaha yang dilakukan Indonesia, yaitu masuk ke dalam pasar internasional. Keberadaan Indonesia di pasar internasional menghasilkan ketersediaan pangan pokok berbasis impor yang selalu tersedia bahkan bertambah setiap tahunnya. Beberapa komoditas yang

permintaannya dipenuhi melalui impor yakni, beras, susu, dan daging sapi. Daging sapi contohnya pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi volume impor. Pada tahun 2005, impor daging sapi mencapai nilai setara dengan 40,91 juta dollar Amerika dan tahun 2014 meningkat sebesar 65,70 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan impor ini disebabkan oleh penurunan produksi daging sapi dalam negeri yang mencapai minus (-) 19,86 persen dan 7.150 ton pada tahun yang sama.⁴ Indonesia mengalami defisit produksi pangan dalam negeri meskipun memiliki kapabilitas nasional yakni sebagai negara kepulauan dengan beragam topografi dan iklim serta sumber daya alam yang melimpah dalam hal produksi pangan dibandingkan negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat.⁵ Menurut Asisten Direktur Jenderal FAO, Hiroyuki Konuma, Indonesia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memproduksi pangan dan menghadapi tantangan-tantangan menuju tahun 2050.⁶ Populasi Indonesia yang kurang lebih berjumlah 253 juta jiwa selain menggambarkan besarnya kebutuhan pangan juga memberikan gambaran bahwa terdapat sumber daya manusia untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Seperti peningkatan jumlah sarjana pertanian dari 300 ribu (2012) menjadi 400 ribu (2013) dan jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani yang berjumlah kurang lebih 50 persen dari populasi penduduk total.⁷

Beranjak dari krisis pangan dan kapabilitas Indonesia tersebut, tulisan ini akan menganalisis alasan Indonesia menjadi

¹Y. Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (Ketahanan Pangan).

²Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2015* (hlm 1-2). Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2015

³T. Tambunan, *Ketahanan Pangan di Indonesia*. Mengidentifikasi beberapa penyebab. 2008

⁴T.A. Hanum & W. Setyari, Analisis Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 2000-2015. *E-Jurnal EP Unud*, 7(8).

⁵Cantrell, B. *Food, the State and Development: A Political Economy of Agriculture and Trade in Indonesia* (hlm. 4), Washington: University of Washington. 2015

⁶Sekretariat Presiden, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Pembukaan Seminar Pameran Pangan Nasional, Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia, Feed the World 2012*, Jakarta: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 2012

⁷S. Ika, Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan: Negara Wajib Mewujudkannya, *Rubik Edukasi Fiskal*. 2013

bergantung kepada pasar internasional dalam mencapai ketahanan pangan. Tulisan ini akan membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat untuk melihat bagaimana negara-negara ini dapat mencapai ketahanan pangan di dalam keikutsertaan mereka di pasar internasional.

Kerangka Pemikiran dan Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif yang bersifat perbandingan. Dengan jenis penelitian kualitatif melalui pemilahan data dan perbandingan poin-poin penting untuk mendapatkan hasil penelitian. Perbandingan yang terdapat di dalam penelitian mencakup perbandingan antara Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat. Keempat negara dipilih dengan Indonesia sebagai negara pembanding utama, Vietnam sebagai negara dengan fokus produksi dan konsumsi panganan utama beras, Malaysia sebagai negara tertangga terdekat dengan kebijakan spesifikasi produksi, dan Amerika Serikat sebagai negara maju yang memiliki pengaruh besar di pasar internasional dan menggunakan kebijakan swasembada pangan.

Dalam melihat perbandingan negara, penulis menggunakan konsep ketergantungan, kapabilitas nasional, dan keuntungan relatif. Ketergantungan melihat bahwa terdapat sebuah sistem yang kompleks yang mempengaruhi ketahanan pangan dan pemahaman mendalam mengenai ketahanan pangan. Akibat dari kompleksnya permasalahan ketahanan pangan dari nasional dan jaringan internasional, maka sudah menjadi tugas dari setiap negara untuk mencegah kelaparan. Oleh karena itu, negara-negara khususnya negara yang lebih maju berusaha membentuk sistem pasar yang dapat meminimalisir terjadinya kelaparan tanpa sepenuhnya merugikan mereka. Dalam hal ini, kerugian diminimalisir dengan membuat negara yang lebih membutuhkan bantuan dari adanya pasar internasional bergantung pada sistem pasar yakni, ketersediaan yang pasti di dalam pasar internasional terhadap kebutuhan negara. Negara yang membentuk dan mempertahankan sistem pasar internasional

dengan kekuasaan politik dan motivasinya untuk mendominasi permasalahan internasional membuat peraturan dan institusi yang kedepannya dapat melayani kepentingan mereka dalam hal ini terkait ketahanan pangan.⁸ Suatu negara seperti Indonesia dapat bergantung kepada pasar internasional dalam mencapai ketahanan pangan jika dilihat melalui konsep ini dikarenakan adanya dominasi negara dalam pembuatan aturan dan institusi yang bertujuan membantu mencapai ketahanan pangan.

Namun, ketergantungan Indonesia tidak sepenuhnya berdasarkan aturan dan institusi internasional. Kemampuan negara dalam memaksimalkan kapabilitas yang dimilikinya juga mempengaruhi. Kapabilitas nasional disebut juga kekuasaan nasional. Menurut Viotti dan Kauppi, kapabilitas nasional terbagi menjadi kapabilitas politik, sosial dan budaya, geografi dan ekonomi, dan militer. Penelitian ini melihat kapabilitas politik yang dimiliki Indonesia yakni reputasi negara di dunia internasional, kapabilitas sosial dan budaya yakni tingkat pendidikan dan distribusi keterampilan, serta kapabilitas geografi dan ekonomi yakni sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai perbandingan akan melihat kapabilitas nasional Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat.⁹ Kapabilitas nasional akan dapat maksimal dikembangkan negara dengan menggunakan kebijakan yang sesuai. Kebijakan keuntungan relatif adalah salah satu yang sesuai dan dapat digunakan negara dalam mencapai ketahanan pangan di pasar internasional. Keuntungan relatif melihat bahwa pasar dapat memberikan keuntungan karena secara alami orang cenderung akan bekerja bersama, bertukar barang dan menghasilkan barang.

Dengan melihat kelebihan yang dimiliki negara melalui kapabilitas nasionalnya dan berkonsentrasi pada spesifikasi produksi, maka

⁸ P. Hough, *Chapter 16 International Political Economy I: Theory & History*. 2010

⁹ P. R. Viotti & M. V. Kauppi, *Chapter 6 Power in International Relations and World Politics*, Pearson Education, 2013

negara akan mendapatkan lebih banyak keuntungan di pasar internasional. Hal ini sesuai dengan gagasan perdamaian Kantian yang menganjurkan negara untuk terikat dalam perdagangan yang akan memberikan insentif ekonomi untuk perdamaian.¹⁰ Dengan ini, masuknya negara ke pasar internasional setelah memutuskan untuk menggunakan kebijakan keuntungan relatif akan dapat mewujudkan keinginan untuk menjaga ketahanan pangan dunia dengan lebih mudah. Terutama dengan menggunakan kebijakan keuntungan relatif negara akan dapat memaksimalkan produksi dan membeli kebutuhan yang tidak dapat di produksi dalam negeri melalui pasar internasional. Ketergantungan negara yang masuk dalam pasar internasional didukung oleh sistem yang memiliki prinsip bangsa atau negara yang paling disukai. Dimana negara yang masuk dalam pasar dan terus melakukan aktivitas serta menjalin hubungan dengan negara lain melalui pasar akan lebih disukai seperti Amerika Serikat. Meski terdapat negara seperti Indonesia yang memiliki kapabilitas nasional untuk menghasilkan produk khususnya pangan sendiri. Namun, di lain sisi pasar dapat terus berjalan karena adanya negara yang membutuhkan produk dari negara lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan negara untuk melakukan spesifikasi produksi, memaksimalkan produksi pada satu sektor maupun produk yang sesuai dengan kapabilitas nasionalnya seperti yang dilakukan oleh Vietnam dan Malaysia. Dalam memahami situasi ketergantungan negara terhadap pasar internasional terdapat dua hal yang perlu dipahami lebih dalam. Pertama, kondisi ketahanan pangan negara baik Indonesia, Vietnam, Malaysia, maupun Amerika Serikat. Kedua, kondisi pasar internasional secara umum dan dalam hal pangan.

Kondisi Ketahanan Pangan Negara

Ketahanan pangan di Indonesia berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.¹¹ Berdasarkan data prediksi dari tahun 2000-2091 pertumbuhan penduduk Indonesia serta kebutuhan dasarnya akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan. Kebutuhan dasar yang dilihat di sini adalah kebutuhan terhadap beras. Peningkatan dari tahun 2001-2010 dari 1991-2000 sebesar 32 juta jiwa. Hal ini menggambarkan peningkatan 4.608 juta ton kebutuhan beras. Kemudian, tahun 2011-2020 memperlihatkan peningkatan sebesar 27 juta jiwa dengan 3.888 juta ton kebutuhan beras meningkat.¹² Hal ini menggambarkan situasi seperti konsep Malthus dimana pertumbuhan penduduk melonjak dan kebutuhan tidak dapat dipenuhi melalui produksi saja. Karena di saat yang bersamaan luas panen dan luas wilayah panen semakin mengecil atau dengan kata lain tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan.

Penurunan jumlah panen dan lahan tanam mempengaruhi peningkatan harga pangan. Kondisi ketahanan pangan akan tercipta jika penduduk mendapatkan akses baik secara fisik dan ekonomi terhadap pangan. Namun, dengan meningkatnya harga pangan ini mengakibatkan penduduk tidak dapat mengakses hasil produksi dalam negeri. Sibuea melihat terdapat beberapa permasalahan kabupaten di Indonesia yang menyebabkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Pertama, ketersediaan pangan yang berfokus pada beras dan tidak melihat pada pangan lokal seperti jagung dan ubi-ubian. Kedua, akses terhadap pangan secara ekonomi tidak terjangkau. Ketiga, kesehatan dan gizi penduduk yang tidak baik karena masih kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan tidak adanya akses maupun orang untuk membangun pusat kesehatan terdekat. Keempat, sarana daerah yang masih kurang mencukupi seperti akses jalan, listrik, dan air

¹⁰, P. Hough, *Chapter 16 International Political Economy I: Theory & History*, 2010

¹¹ H. Suharyanto, Ketahanan Pangan, *Jurnal Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2*, 2011

¹² H. D. Atmanti, *Kajian Ketahanan Pangan di Indonesia, Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 21 No. 1*

bersih. Kelima, pendidikan penduduk yang masih banyak berada pada taraf buta huruf khususnya wanita.¹³ Masuknya Indonesia di pasar internasional guna mengatasi situasi kekurangan di dalam negeri didukung oleh beberapa pihak. Pihak ini melihat dari keuntungan yang didapatkan melalui pasar internasional dan alasan Indonesia untuk tetap berada di dalam pasar internasional. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan Indonesia tidak akan bisa lepas dari impor pangan karena mekanisme pasar yang terus bertumbuh. Kelas menengah yang terus menerus tumbuh akan meningkatkan permintaan akan pangan sehingga impor masih harus dilakukan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem pertahanan rakyat semesta berlapis dimana pertahanan lapis terakhir yakni perang berkelanjutan. Oleh karena itu impor harus tetap dilakukan untuk menutupi kebutuhan rakyat dan seandainya dihentikan akan menyulitkan negara.¹⁴

Ketahanan pangan negara lain dalam kondisi krisis pangan global beberapa mengalami peningkatan. Vietnam dan Malaysia merupakan dua negara dari wilayah Asia Tenggara yang mampu meningkatkan akses, ekonomi, dan sarana terhadap pangan. Selain itu kedua negara juga meningkat dalam frekuensi perdagangan di pasar internasional. Vietnam mengalami peningkatan sebesar 101 persen terhadap kualitas sanitasi dan penurunan kesenjangan di antara daerah pedesaan dan perkotaan sebanyak 22 persen. Setidaknya sekitar 95 persen dari populasi sudah menerima akses berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas air bersih yang kemudian dapat digunakan untuk bertani, masak, minum, dan sebagainya. Perkembangan per kapita Vietnam juga menunjukkan peningkatan yang

stabil.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi Malaysia juga menunjukkan angka yang cukup baik dengan peningkatan pendapatan per kapita nasional sebesar 115 persen, angka kurang gizi di bawah 5 persen, dan akses terhadap sanitasi yang baik meningkat hingga dapat digunakan oleh 96 persen dari total populasi. Ditambah lagi hampir 100 persen rumah di Malaysia telah menerima peningkatan akses terhadap sumber air sehingga penyakit yang datang melalui makanan dan air sangat jarang ditemukan.¹⁶

Dalam pemetaan negara-negara dengan keadaan ketahanan pangan paling baik di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-65. Sedangkan Amerika Serikat menduduki peringkat ke-3, Malaysia peringkat ke-40, dan Vietnam peringkat ke-62.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa dalam beberapa indikator penilaian, Indonesia masih belum cukup dalam menjaga ketahanan pangannya. Selain kondisi ketahanan pangan negara, perlu untuk melihat kondisi pasar internasional untuk mengetahui situasi di dalam pasar.

Kondisi Pasar Internasional

Pasar internasional didominasi oleh pengaruh negara yang lebih maju dan organisasi internasional. Negara yang lebih maju dapat mendominasi pasar internasional karena mereka sudah lebih dulu merdeka dan memiliki sistem pangan yang lebih terstruktur dan stabil seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki sistem pengatur pangan melalui institusi resmi dan sistem yang dibantu dengan teknologi, lebih mudah ditemui yakni melalui laman *website* khusus perdagangan dan pangan.¹⁸ Kemudian, dengan sistem yang lebih terstruktur tersebut negara lain menjadi lebih tertarik untuk bekerja sama dengan

¹³ Tulus Tambunan, *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*, Jakarta. UI Press. 2010

¹⁴ Merdeka.com, 5 Fakta Indonesia tak bisa lepas impor pangan, <https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-indonesia-tak-bisa-lepas-impor-pangan/tinggalkan-beras-malah-beralih-ke-mi-instan.html>

¹⁵ FAO, Viet Nam – Food and Nutrition Security Profiles. Diambil dari www.fao.org/3/a-at704e.pdf

¹⁶ FAO, Malaysia – Food and Nutrition Security Profiles. Diambil dari <http://www.fao.org/3/a-at699e.pdf>

¹⁷ Global Food Security Index, Explore countries, Diambil dari <https://foodsecurityindex.eiu.com/Country>

¹⁸ USDA. Exporting Organic Products from the U.S., diambil dari <https://www.ams.usda.gov/publications/content/exporting-organic-products-us>

Amerika Serikat dan tidak sedikit dari negara yang sudah merupakan negara maju dan dapat membantu mengembangkan sistem perdagangan dan pangan dunia.

Organisasi internasional juga membantu membentuk sistem pasar internasional. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), membantu membuat jalur perdagangan yang bebas dari kekhawatiran persebaran penyakit yang dapat mengakibatkan prosedur karantina di masa pertumbuhan perdagangan internasional.¹⁹ Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di bidang pertanian dengan AoA atau *Agreement on Agriculture* yang dimilikinya menjamin kebebasan perdagangan atau liberalisasi dalam beberapa aspek perdagangan pertanian seperti pengurangan tarif dalam produk pertanian dan memberi ijin pada banyak program subsidi untuk berlanjut di negara-negara industri.²⁰ Dengan ini WHO secara langsung juga membantu pasar internasional untuk terus bergerak. Selanjutnya akan dilihat bagaimana ketergantungan negara terhadap pasar internasional berdasarkan perbandingan Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat

Ketergantungan Negara terhadap Pasar Internasional dalam Hal Pangan pada Tahun 2009-2014

Ketergantungan pada pasar internasional terjadi karena adanya negara yang memiliki kebijakan keuntungan relatif, yang mendominasi sistem pasar bersama dengan organisasi internasional, dan kapabilitas yang kurang dimaksimalkan.

a. Keuntungan Relatif sebagai Cara Mencapai Keuntungan di Pasar Internasional

Keuntungan relatif melihat bahwa negara harus memahami kapabilitas yang dimilikinya

sehingga negara dapat memaksimalkan kemampuan kapabilitas yang paling menguntungkan nantinya. Misal, dalam produksi minuman anggur (*wine*) dan pakaian antara Inggris dan Portugal. Kedua negara mampu untuk memproduksi kedua komoditas tersebut. Namun, setelah melihat kondisi biaya produksi serta keadaan geografis negara, maka produksi *wine* akan lebih murah dilakukan di Portugal dan produksi kain untuk pakaian akan lebih murah di Inggris. Nantinya untuk kebutuhan *wine* Inggris akan membeli produksi Portugal dan sebaliknya untuk produk kain pakaian. Oleh karena itu, negara akan lebih diuntungkan bila melakukan spesialisasi produksi agar biaya produksi tidak menutupi kemampuan negara nantinya untuk membeli dalam memenuhi kebutuhan penduduk.²¹

Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan menggunakan kebijakan swasembada. Kebijakan ini berfokus pada usaha negara untuk memenuhi kebutuhan nasional melalui produksi dalam negeri. Namun, Indonesia masih berada di bawah kategori negara yang tidak dapat mempertahankan ketahanan pangannya setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Ketahanan pangan digambarkan sebagai kondisi dimana pangan tersedia, dapat diakses secara ekonomi dan fisik, dan didukung oleh sarana untuk mencapainya. Ketahanan pangan tidak menutup keadaan bahwa perdagangan tidak dapat dilakukan dan harus menggunakan hasil produksi dalam negeri saja untuk pemenuhannya.

Swasembada dengan target keberagaman hasil pangan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan peningkatan kebutuhan. Awalnya Indonesia berusaha fokus terhadap hasil produksi komoditas beras sebagai panganan utama. Namun, produksi beras belum dapat memenuhi permintaan dalam negeri.

¹⁹ C. Clift, The Role of the World Health Organization in the International System. *Centre on Global Health Security Working Group Papers*, Volume I. 2013

²⁰ J. Clapp, *Background paper prepared for The State of Agricultural Commodity Markets 2015-16*, Food security and international trade: Unpacking disputed narratives.

²¹ G. Faccarello, Comparative Advantage. *Research Gate*, 30 Agustus.hlm. 1-16. 2015

Tabel 1. Luas dan Hasil Panen Komoditas

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Perbandingan 2014 thdp 2013
		2013	2014	
1	Bawang Putih	2.479	1.913	-22,83
2	Kacang Merah	18.881	16.170	-14,36
3	Tomat	59.738	59.008	-1,26
4	Ketimun	49.296	48.578	-1,46

Sumber: Dimodifikasi dari Kementerian Pertanian, 2015

Tabel 2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan 2010-2014

Tahun	Jenis Tanaman Padi		
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kuintal/ha)
2010	13 253,5	66 469,4	50,15
2011	13 203,6	65 756,9	49,80
2012	13 445,5	69 056,1	51,36
2013	13 835,3	71 279,7	51,52
2014	13 793,6	70 831,8	51,35

Sumber: Dimodifikasi dari Badan Statistik Indonesia, 2015

Tabel 1. Memperlihatkan luas dan hasil panen dari komoditas lain di tahun 2009 hingga 2014 seperti tanaman sayur, buah, dan biofarmaka hampir di seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan. Bawang putih misalnya mengalami penurunan luas panen sebanyak 22,83 persen, kacang merah menurun sebanyak 14,36 persen, tomat menurun sebanyak 1,26 persen, dan ketimun menurun sebanyak 1,46 persen. Tabel 2. Memperlihatkan luas panen, produksi, dan produktivitas padi Indonesia masih cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011-2015.

Penurunan hasil panen ditambah dengan harga beli pemerintah menjadi alasan petani sulit untuk dapat menanam padi di musim berikutnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan penduduk untuk membeli sehingga meskipun terdapat beras untuk dibeli tetapi secara ekonomi tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.²²Melihat dari total populasi dunia yang semakin meningkat hingga dapat mencapai 9 milyar orang di tahun 2050 maka permasalahan ketahanan pangan menjadi semakin penting. Dua kunci yang dapat mengatasi kondisi ini yaitu meningkatkan

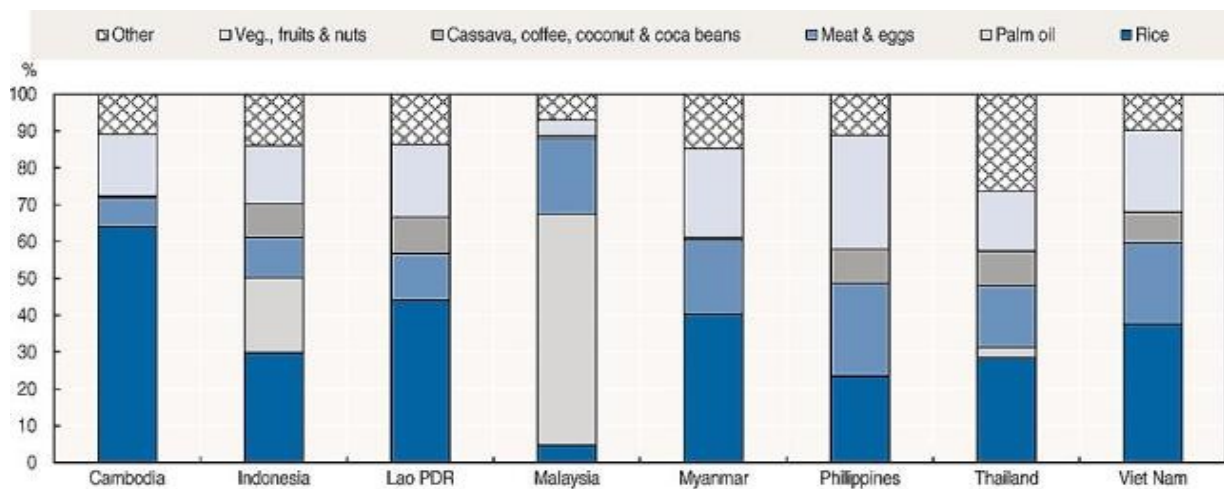
produksi pertanian dan perdagangan. Perdagangan menjadi penting bagi negara-negara yang khususnya tidak memiliki kapabilitas dan akses terhadap sumber pangan yang sehat dan mencukupi.²³ Harapan untuk kedepannya adalah setiap penduduk dari tiap negara dapat mengkonsumsi pilihan produk pangan mereka kapan saja, dimana saja dengan kualitas yang bergizi. Sesuai dengan kebijakan keuntungan relatif, negara yang terspesifikasi atau melakukan spesifikasi produksi akan mendapatkan keuntungan di pasar internasional di era globalisasi. Sebab, dengan menjadi negara yang fokus dalam produksi suatu komoditas mereka akan menjadi “*bread basket*” atau sumber produksi di seluruh dunia. Kemudian, sebagai sumber produk tersebut dan karena komoditas tersedia dalam jumlah banyak, maka akan menghasilkan pengurangan harga produk dari produksi negara yang melakukan spesifikasi produksi.²⁴

²³ C. Christensen, “Progress and Challenges in Global Food Security,” diambil dari <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/januaryfebruary/progress-and-challenges-in-global-food-security/>

²⁴ T. Benton, “Food security, trade and its impacts,” <https://resourcetrade.earth/stories/food-security-trade-and-its-impacts#top>

²² Kementerian Pertanian, *Statistik Produksi Hortikultura Tahun 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura. 2015

Gambar 1. Bagian Produksi Pertanian Asia Tenggara Menurut Negara, 2013



Sumber: FAO (2017a) dalam OECD-FAO 2017

Gambar 1. menunjukkan hasil produksi negara-negara di Asia Tenggara. Seperti yang terlihat Indonesia merupakan negara yang berusaha untuk melakukan keberagaman produksi baik dalam komoditas pangan maupun non pangan. Sedangkan Malaysia dan Vietnam merupakan negara yang menggunakan kebijakan keuntungan relatif yaitu memproduksi spesifik satu komoditas secara maksimal. Dengan Malaysia mencoba untuk melakukan spesialisasi produksi minyak kelapa sawit dan Vietnam memproduksi beras. Pemerintah Vietnam mendukung penuh negara dalam memproduksi beras. Pemerintah memberikan bantuan dana maupun membuat keputusan dan aturan yang memudahkan produksi beras seperti sewa lahan dan air dalam memproduksi beras. Sehingga hal ini menguntungkan Vietnam sebagai salah satu negara produsen beras di Asia Tenggara.²⁵

b. Pasar Internasional Mendukung Kebijakan Keuntungan Relatif

Kebijakan keuntungan relatif menjadi lebih menguntungkan ketika pasar internasional mendukung kebijakan tersebut dengan sistem yang dimilikinya. Pasar internasional

mendorong negara untuk melakukan perdagangan sebagai bentuk kepedulian dan usaha bersama dalam menjaga ketahanan pangan negara dan internasional. Akan tetapi di dalam pasar internasional sistem yang mengakibatkan ketergantungan sudah lebih dulu dibuat dan menjadi aturan dasar saat memasuki pasar internasional.

Sejak tahun 1947 GATT dan atau WTO menggunakan prinsip bangsa yang paling disukai dalam mendorong negara melakukan perdagangan di pasar internasional. Prinsip bangsa yang paling disukai memiliki inti untuk memberikan beberapa ketertiban dan keterbukaan dalam perdagangan internasional. Meski pada awalnya hubungan yang digambarkan oleh prinsip ini berada pada kesepakatan dua negara namun, jika kesepakatan berkembang antar negara maka akan ada lebih banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Misal, pemotongan tarif antar negara dalam kerja sama multilateral. Kerja sama juga tidak tertutup hanya antara negara maju saja tetapi juga dengan negara yang sedang berkembang. Dengan adanya prinsip ini maka diharapkan setiap negara yang tergabung dalam pasar internasional dapat membuka pintu perdagangan mereka kepada setiap negara.

²⁵Dr. Tran Cong Thang & Dinh Thi Bao Linh, Rice Policy Review in Vietnam, Diambil dari: http://ap.ffc.agnet.org/ap_db.php?id=406

Prinsip ini juga menggambarkan kondisi dimana ketika negara disukai oleh negara lain maka kesempatan untuk melakukan kerja sama menjadi lebih besar. Kesempatan yang lebih akan menghasilkan kemudahan dalam mencapai target yang dimiliki negara seperti dalam hal mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan.²⁶

Prinsip ini berhasil membawa Indonesia ke pasar internasional dan memastikan posisi Indonesia di kerja sama yang sudah ada. Indonesia tidak dapat secara sepihak memutus kerja sama yang sudah ada dan menaikkan tarif pada satu negara saja karena akan melanggar kesepakatan bersama. Beberapa kali Indonesia berusaha keluar dari kerja sama maupun mengurangi kuota impor terhadap suatu komoditas. Akan tetapi Indonesia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Tahun 2012 Indonesia ingin lebih membatasi impor produk hortikultura. Hal ini ditentang oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan alasan Indonesia tidak konsisten dalam melaksanakan kewajiban yang sudah ada di WTO. Tahun 2014 Indonesia berusaha untuk mengurangi impor komoditas ayam dari Brasil. Respon Brasil adalah dengan meminta bantuan WTO untuk mengingatkan Indonesia bahwa jika Indonesia akan mengurangi kuota impor ayam maka Indonesia akan melanggar perjanjian yang sudah ada.²⁷

Prinsip bangsa yang paling disukai membantu memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh negara dengan kebijakan keuntungan relatif. Karena keuntungan relatif mendorong negara untuk memaksimalkan spesialisasi produksi sehingga negara tersebut pasti akan membeli dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi dalam negeri. Kemudian prinsip bangsa yang paling disukai mendorong negara untuk terus melakukan perdagangan. Kedua hal ini mendorong terjadinya perdagangan sehingga

bagi Indonesia yang melakukan swasembada itu akan merugikan produk lokal dan Indonesia menjadi bergantung pada pasar internasional.

c. Kapabilitas Nasional Suatu Negara dalam Mencapai Ketahanan Pangan

Kapabilitas nasional yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Sehingga hasil maksimal dari suatu kebijakan akan berbeda di tiap negara. Indonesia memiliki banyak kapabilitas yang dapat dikategorikan sebagai kapabilitas politik, sosial dan budaya, dan geografi dan ekonomi. Ketiga kategori ini sesuai untuk melihat bagaimana Indonesia memaksimalkan kapabilitas yang dimilikinya dalam mencapai ketahanan pangan melalui pasar internasional. Kapabilitas nasional juga dapat menjadi pemicu ketergantungan Indonesia pada pasar internasional meskipun masih banyak potensi yang dimilikinya.

Kapabilitas politik Indonesia yang menjadi sorotan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009-2014 yakni reputasi Indonesia di mata internasional. Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa kepemimpinannya menggunakan 'a million friends, zero enemies' serta *all direction forum policy*. Dengan dua prinsip ini Indonesia menjadi negara yang banyak mendapatkan kerja sama dengan negara lain karena inti dari prinsip ini sendiri yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang disukai oleh setiap negara dan tidak memiliki musuh di dunia internasional.²⁸ Hasil dari penggunaan kedua prinsip tersebut adalah Indonesia mampu memberikan kesan yang bagus di dunia internasional dan memperluas pengaruhnya di internasional.

Kemudian kapabilitas sosial dan budaya melihat bahwa kesamaan yang dimiliki setiap negara dapat mendorong negara tersebut melakukan kerja sama akan tetapi yang dititikberatkan oleh kapabilitas ini adalah

²⁶ Part II Chapter I Most-Favoured-Nation Treatment Principle.

²⁷ M. E. Limenta & S. Chandra, Indonesian Food Security Policy, *Indonesia Law Review 2 Volume 7 Nomor 2*. 2017

²⁸ R. Afrido, "SBY kembali dengungkan slogan *zero enemy million friends*," <https://nasional.sindonews.com/read/815880/12/sby-kembali-dengungkan-slogan-zero-enemy-million-friends-1386759948>

tingkat pendidikan dan distribusi keterampilan penduduk di suatu negara. Dalam mencapai ketahanan pangan salah satu sektor yang memerlukan perhatian adalah sektor pertanian. Oleh karena itu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut harus lebih maksimal. Akan tetapi Indonesia berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional di tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sumber daya manusia di sektor pertanian secara umum masih relatif rendah dibandingkan dengan yang bekerja di sektor lain. Sekitar 72,6 persen tenaga kerja sektor pertanian hanya merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar atau bahkan tidak pernah menduduki bangku sekolah sama sekali. Meskipun saat ini sektor pertanian hanya mendapatkan satu pertiga dari total tenaga kerja nasional tetapi sektor pertanian merupakan sektor penyedia lapangan kerja yang besar karena sifat dan kegiatannya yang masih bersifat konvensional. Dengan kata lain, pekerja di sektor pertanian tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi.²⁹

Meskipun di era globalisasi perkembangan teknologi di bidang pangan sudah banyak dilakukan seperti penggunaan mesin menggantikan tenaga konvensional sehingga meski terdapat peningkatan jumlah sarjana pertanian, kebanyakan dari mereka memilih untuk bekerja di sektor yang lebih menjanjikan dan dipandang seperti sektor jasa. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan tingkat kesejahteraan paling rendah di Indonesia sehingga tidak sebanding dengan harapan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Setelah reputasi di mata internasional dan kemampuan penduduk di sektor pangan beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan, kapabilitas geografi dan ekonomi akan digunakan untuk melihat sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan sejauh apa Indonesia mampu bertumbuh dari segi

ekonomi. Di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009-2014 perkembangan dan pembangunan di Indonesia lebih besar di sektor infrastruktur jalan dan gedung. Dengan pembangunan jalan nasional mencapai tingkat kemantapan hingga 92,95 persen, dan di akhir 2014 mencapai 94 persen. Pembangunan infrastruktur jalanan ini tujuannya adalah meningkatkan kemudahan akses baik untuk perekonomian maupun sebagai gambaran bahwa Indonesia memiliki lahan pembangunan.³⁰

Kapabilitas nasional Indonesia dari segi politik, sosial dan budaya, dan geografi dan ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat memaksimalkan kapabilitasnya. Usaha swasembada yang dilakukan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik karena pembangunan dalam negeri dan faktor pendukung seperti sumber daya alam dan manusianya tidak ikut berfokus dalam mencapai ketahanan pangan. Ketidakmampuan negara dalam memaksimalkan kapabilitasnya, kebijakan negara lain yang berbeda, dan sistem pasar internasional yang mendukung perdagangan mendorong Indonesia bergantung pada pasar internasional.

d. Perbandingan Ketergantungan Indonesia dengan Negara Lain terhadap Pasar Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dapat dicapai dengan berbagai cara tidak hanya dengan fokus memproduksi dari dalam negeri maupun dengan melakukan jual beli saja. Terdapat beberapa hal yang saling mempengaruhi kemampuan negara untuk mencapai ketahanan pangan khususnya setelah memasuki pasar internasional. Perbandingan negara ini kemudian akan mencoba memberikan gambaran mengenai persamaan maupun perbedaan cara negara mencapai ketahanan pangan. Perbandingan antara Indonesia,

²⁹ Badan Pusat Statistik, *Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik. (2014)

³⁰ DetikFinance, "Zaman Presiden SBY Dibangun Jalan 4.770 Km," <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2721559/zaman-presiden-sby-dibangun-jalan-4770-km>

Vietnam dan Malaysia dilakukan dengan melihat lokasi dari negara-negara tersebut yang berada di satu wilayah Asia Tenggara.

Dengan melihat kebijakan negara yakni, Indonesia dengan swasembada dan Vietnam serta Malaysia dengan keuntungan relatif dimana Vietnam melakukan spesifikasi produksi pada komoditas beras dan Malaysia pada minyak kelapa sawit. Kemudian, perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat dilakukan dengan melihat Amerika Serikat yang juga menggunakan swasembada seperti Indonesia. Namun, Amerika Serikat lebih mampu mempertahankan ketahanan pangannya dibanding Indonesia dengan turut serta dan mampu mengikuti sistem pasar internasional dengan melakukan pasar terbuka.

Pertama, dilihat dari kebijakan swasembada yang dilakukan negara. Kebijakan swasembada yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat memberikan hasil yang berbeda. Amerika Serikat mampu menjaga ketahanan pangannya karena melakukan perdagangan terbuka di saat yang bersamaan.

Perdagangan terbuka ini mendukung kondisi Amerika Serikat yang kurang memiliki sumber daya alam. Amerika Serikat mampu mengembangkan kapabilitas yang dimilikinya yakni sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia yang dimiliki Amerika

Serikat memiliki kualitas di atas kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Hal ini dilihat dari kemampuan untuk menempuh pendidikan, khususnya dalam bidang pangan selain karena banyaknya tenaga ahli di bidang pangan penggunaan teknologi masa kini semakin banyak digunakan oleh Amerika Serikat. Teknologi yang digunakan seperti pembuatan situs pemerintahan dan ekspor-impor yang memudahkan pihak lain untuk melakukan kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Amerika Serikat.

Dilihat dari kemudahan untuk mengakses komoditas melalui situs dan informasi serta kontak yang jelas tertulis di dalam situs tersebut. Selain itu, Indonesia di tahun 2009-2014 berusaha untuk mempertahankan reputasinya di dunia internasional bersamaan

dengan melakukan swasembada. Hal ini tidak sesuai jika mengharapkan lebih banyak kerja sama untuk datang dan dapat meninggalkan kerja sama yang sebelumnya sudah dilakukan oleh negara.

Kedua, kebijakan swasembada dan perdagangan terbuka yang digunakan oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan adanya sistem dalam pasar internasional yang mengharuskan keterbukaan perdagangan menyebabkan Indonesia tidak dapat lepas dari perjanjian dan impor yang sudah dilakukan. Dengan ini Indonesia meskipun sudah swasembada menjadi bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi ketahanan pangannya. Seperti pada tahun 2012 ketika Indonesia membuat kebijakan yang dinilai proteksionis terhadap impor produk hortikultura dan pada tahun 2014 pada komoditas ayam dari Brasil. Amerika Serikat dan Selandia Baru menentang kebijakan proteksionis tersebut dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam melaksanakan kewajiban World Trade Organization (WTO) pada tahun 2012. Di tahun 2014 Indonesia juga mendapatkan penentangan dimana Brasil meminta bantuan WTO untuk mengingatkan Indonesia tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian yang sudah ada.³¹

Ketiga, kebijakan keuntungan relatif yang dimiliki Vietnam dan Malaysia. Kebijakan keuntungan relatif digunakan untuk meminimalisir pengeluaran negara dan memaksimalkan keuntungan negara. Beberapa negara mengantisipasi ketergantungan mereka terhadap pasar internasional dengan menerapkan kebijakan keuntungan relatif. Kebijakan yang dimiliki Vietnam dan Malaysia ini memungkinkan negara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya secara maksimal di berbagai sektor produksi. Seperti Vietnam yang fokus memproduksi beras dan

³¹ M. E. Limenta & S. Chandra, Indonesian Food Security Policy, *Indonesia Law Review 2 Volume 7 Nomor 2*, 12 April

Malaysia yang fokus memproduksi minyak kelapa sawit. Kedua negara mampu mendapatkan keuntungan yakni biaya produksi dapat dialokasikan untuk membeli produk yang tidak diproduksi maupun yang tidak menjadi fokus produksi dalam negeri. Sedangkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan tersebut karena usaha serta biaya produksi swasembada besar tapi tetap harus impor dan biaya impor juga besar. Selain besarnya biaya, setelah swasembada Indonesia tetap menunjukkan peningkatan jumlah impor yang tidak sesuai dengan keinginan untuk mandiri secara ketahanan pangan.

Keempat, keikutsertaan dalam perdagangan internasional mengharuskan negara untuk tetap melakukan perdagangan di pasar internasional. Bagi negara dengan kebijakan swasembada pangan seperti Indonesia hal ini menimbulkan ketergantungan. Karena produksi dalam negeri yang tidak mencukupi dan jumlah impor yang juga semakin tinggi melampaui ekspor yang bisa dilakukannya. Ditambah dengan adanya prinsip negara yang paling disukai dalam sistem pasar internasional mengharuskan adanya interaksi perdagangan untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan negara lain yang menghasilkan lebih banyak kerja sama di masa depan. Dengan harapan bahwa tidak ada negara yang akan menutup pintu perdagangan agar tetap ada negara yang menyediakan dan membeli produk yang dibutuhkan di pasar internasional.

Keempat indikator yaitu swasembada, swasembada dan perdagangan terbuka, kebijakan keuntungan relatif, dan keikutsertaan di perdagangan internasional menunjukkan perbandingan Indonesia dan negara lain dalam bergantung pada pasar internasional untuk mencapai ketahanan pangan yang dirangkum dalam Tabel 3. Indonesia menjadi negara yang bergantung pada pasar internasional karena dalam pangan memiliki kebijakan swasembada yang tidak menunjang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pasar. Selain itu kebijakan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia, keuntungan relatif, yang mampu memberikan keuntungan besar dari ikut perdagangan dan negara swasembada seperti Amerika Serikat yang ikut mengedepankan perdagangan sebagai cara menjalin hubungan dan memperluas kekuatan serta mencapai ketahanan pangan menyebabkan Indonesia harus terus melakukan perdagangan. Keikutsertaan Indonesia di pasar internasional sejak awal tidak akan dapat dengan mudah dihentikan. Prinsip bangsa yang paling disukai dan keinginan untuk membuka pintu perdagangan sebesar-besarnya bagi tiap negara anggota pasar internasional yang paling dikedepankan. Oleh karena itu, Indonesia yang tidak memiliki kebijakan keuntungan relatif, tidak mampu memaksimalkan kapabilitasnya melalui swasembada, dan ikut serta dalam pasar internasional akan menjadi bergantung dengan pasar dalam mencapai ketahanan pangan.

Tabel 3. Perbandingan Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Amerika Serikat dalam Ketergantungan terhadap Pasar Internasional untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Negara	Indonesia	Vietnam	Malaysia	AS
Indikator				
Swasembada	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Swasembada & Perdagangan Terbuka	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Kebijakan Keuntungan Relatif	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Keikutsertaan di Perdagangan Internasional	Ya	Ya	Ya	Ya

Kesimpulan

Ketergantungan negara terhadap pasar internasional dapat terjadi karena ketergantungan tersebut sudah tersistem akan terjadi dan karena ketidakmampuan negara dalam mengatasi krisis yang sedang dihadapinya. Indonesia bergantung kepada pasar internasional dalam mencapai ketahanan pangan karena adanya ikatan hubungan antara kebijakan negara, sistem pasar, dan kapabilitas negara.

Kebijakan negara yang mengarah pada keuntungan relatif membantu negara tersebut dalam mendapatkan hasil yang maksimal melalui produksi dan keikutsertaannya di pasar internasional. Negara seperti Vietnam dan Malaysia menggunakan kebijakan tersebut dan mendapatkan keuntungan dari dibelinya hasil produksi dalam negeri dan dorongan pasar untuk selalu melakukan perdagangan dapat dilakukan oleh mereka. Perdagangan menjadi lebih mudah dilakukan oleh kedua negara ini dibandingkan dengan Indonesia karena Indonesia sudah mengeluarkan biaya produksi melalui swasembada tetapi tetap tidak mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan masih harus impor dari pasar internasional.

Kebijakan keuntungan relatif ini didukung oleh keberadaan prinsip bangsa yang paling disukai. Prinsip yang terdapat di sistem pasar internasional ini mendorong adanya perdagangan dengan melihat bahwa untuk dapat disukai harus melakukan kerja sama perdagangan maupun mempertahankan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya. Bahkan, bagi negara yang mengedepankan swasembada tidak akan bisa lepas begitu saja dari kerja sama yang sudah disepakati bersama. Sehingga kebijakan disertai dengan prinsip ini mengakibatkan negara yang tidak menggunakan kebijakan dan yang berusaha untuk keluar dari kerja sama menjadi masuk dalam situasi ketergantungan. Ketergantungan Indonesia selain adanya faktor dari luar tersebut juga disebabkan faktor dari dalam.

Indonesia tidak mampu memaksimalkan kapabilitas yang dimilikinya. Keinginan Indonesia di bawah pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono di tahun 2009-2014 dalam mempertahankan reputasi sebagai teman semua negara tidak sesuai dengan keinginannya untuk swasembada pangan. Karena sebagai teman dari negara lain harapan yang diberikan adalah untuk dapat mempertahankan dan memperluas jangkauan kerja sama karena ketahanan pangan di pasar internasional dapat dicapai melalui peningkatan ketahanan pangan dan perdagangan. Secara sosial dan budaya dimana tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih jauh dari harapan. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan kemampuan yang masih konvensional tidak akan dapat menarik tenaga kerja dengan keahlian khusus. Tidak seperti Amerika Serikat yang terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya untuk memaksimalkan sumber daya lain yang dimiliki negara. Semua hal ini tidak akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang dapat lepas dari ketergantungannya terhadap pasar internasional dalam mencapai ketahanan pangan.

Diharapkan, penelitian mengenai ketahanan pangan selanjutnya dapat berfokus pada perubahan setelah pergantian era pemerintahan. Ditambah lagi dengan melihat faktor lain serta melihat dari sudut pandang negara yang ikut maupun tidak ikut dalam pasar internasional dapat memperkaya sudut pandang dalam melihat permasalahan ketahanan pangan di pasar internasional yang menimbulkan ketergantungan seperti yang sudah dibahas dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Afrido, R. (2013). SBY kembali dengungkan slogan zero enemy million friends. *Sindo News*, Berita Nasional. Diambil dari: <https://nasional.sindonews.com/read/815880/12/sby-kembali-dengungkan-slogan-zero-enemy-million-friends-1386759948>
- Anon. *Part II Chapter I Most-Favoured-Nation Treatment Principle*.

- Atmanti, H. D. (2010). Kajian Ketahanan Pangan di Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 21(1), 51-60
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Indonesia 2015* (hlm. 1-2). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Benton, T. Food security, trade and its impacts. *Resource Trade Earth, Stories*. Diambil dari <https://resourcetrade.earth/stories/food-security-trade-and-its-impacts#top>
- Cantrell, B. (2015). *Food, the State and Development: A Political Economy of Agriculture and Trade in Indonesia* (hlm. 4). Washington: University of Washington.
- Christensen, C. (2018). Progress and Challenges in Global Food Security Diambil dari <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2018/januaryfebruary/progress-and-challenges-in-global-food-security/>
- Clapp, J. (2015). *Food security and international trade: Unpacking disputed narratives. Background paper prepared for The State of Agricultural Commodity Markets 2015-16*. Roma: Organisasi Pangan dan Pertanian.
- Clift, C. (2013). *The Role of the World Health Organization in the International System*. Centre on Global Health Security Working Group Papers, 1.
- detikFinance. (2014). Zaman Presiden SBY Dibangun Jalan 4.770 Km. Detik.com, Berita Ekonomi Bisnis. Diambil dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2721559/zaman-presiden-sby-dibangun-jalan-4770-km>
- Tran Cong Thang; Dinh Thi Bao Linh. (2015). *Rice Policy Review in Vietnam*. Diambil dari: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=406
- Faccarello, G. (2015). Comparative Advantage. *Research Gate*, 30 Agustus.hlm. 1-16.
- FAO. Viet Nam – Food and Nutrition Security Profiles. Diambil dari www.fao.org/3/a-at704e.pdf
- FAO. Malaysia – Food and Nutrition Security Profiles. Diambil dari <http://www.fao.org/3/a-at699e.pdf>
- Global Food Security Index. (2018). Explore countries. Diambil dari <https://foodsecurityindex.eiu.com/Country>
- Hanum, T.A., & Setyari, W. (2018). Analisis Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 2000-2015. *E-Jurnal EP Unud*, 7(8).
- Hough, P. (2010). *Chapter 16 International Political Economy I: Theory & History*.
- Ika, S. (2013). Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan: Negara Wajib Mewujudkannya. *Rubik Edukasi Fiska*, 6.
- Kementerian Pertanian. (2015). *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi*, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Limenta, M. E. & Chandra, S. (2017). Indonesian Food Security Policy. *Indonesia Law Review* 2, 7(2).
- Merdeka.com. (2014). 5 Fakta Indonesia tak bisa lepas impor pangan. Diambil dari <https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-indonesia-tak-bisa-lepas-impor-pangan/tinggalkan-beras-malah-beralih-ke-mi-instan.html>
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (Ketahanan Pangan).
- Sekretariat Presiden. (2012). *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Pembukaan Seminar Pameran Pangan Nasional, Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia, Feed the World 2012*. Jakarta: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
- Suharyanto, H. (2011) Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2).

Tambunan, T. (2008). *Ketahanan Pangan di Indonesia*. Mengidentifikasi beberapa penyebab.

Tambunan, Tulus. (2010). *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Jakarta. UI Press.

USDA. Exporting Organic Products from the U.S. Diambil dari <https://www.ams.usda.gov/publications/content/exporting-organic-products-us>

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). *Chapter 6 Power in International Relations and World Politics*. Pearson Education.